



Analisis Komunikasi Politik dalam Proses Pemenangan Prabowo-Sandi di Kota Makassar pada Tahun 2019

Eva Wahyingsih¹, Andi Alimuddin Unde², Muh. Akbar³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

E-mail: revhaeva89@yahoo.com, undealimuddin@yahoo.co.id, muhakbar6764@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-02	<p>The phenomenon of the Patron-Client relationship in Makassar City is a historical and cultural aspect that has developed within the beliefs of the community and has become a pattern of daily life. The aristocrats (patrons) are considered to possess the power needed by the people of South Sulawesi, particularly in Makassar, making them deemed worthy of being leaders. In the 2019 presidential election, the victory of Prabowo-Sandi in Makassar City was supported by the patrons there, who utilized the Patron-Client relationship pattern to secure the success of the Prabowo-Sandi pair. Although some national political figures supported Jokowi-Amin in Makassar City, they did not have a strong enough influence to sway the political choices of the people. This research identifies other factors that allow the political preferences of the people to be mobilized by the ruling elite. The study employs Pareto's theory of Local Elite, which explains the layers within society. The research methodology utilized is qualitative descriptive, gathering data through interviews, observations, and document analysis. The study reveals that the Patron-Client relationship in the victory of Prabowo-Sandi in Makassar City is influenced by three dominant factors: the networks and capabilities of the influential groups, economic investments, and structural positions within the bureaucracy. The victory of Prabowo-Sandi is achieved through the utilization of the Patron-Client relationship formed by these three major groups, leveraging factors such as the establishment of Patron-Client ties, the cultural aspect represented by the strongly held Ajoareng and Joa' traditions within the historical context of Makassar City, the economic factor influencing the political choices of the people, and the reinforcement of the Patron-Client relationship through Islamic organizations and the ideology of divinity.</p>
Keywords: <i>Learning Media;</i> <i>Diorama;</i> <i>Audiovisual;</i> <i>Mutual Cooperation;</i> <i>Pancasila Student Profile.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-02	<p>Fenomena relasi Patron dan Klien di Kota Makassar merupakan aspek historis dan kultural yang terbentuk dalam kepercayaan masyarakat dan menjadi pola kehidupan sehari-hari. Bangsawan (patron) dianggap memiliki kekuatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, sehingga mereka dianggap pantas menjadi pemimpin. Pada Pilpres 2019, kemenangan Prabowo-Sandi di Kota Makassar didukung oleh patron-patron di sana, yang memanfaatkan pola relasi patron-klien untuk memenangkan pasangan tersebut. Meskipun beberapa tokoh politik nasional mendukung Jokowi-Amin di Kota Makassar, mereka belum memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Penelitian ini melihat bahwa ada faktor lain yang membuat pilihan politik masyarakat dapat dimobilisasi oleh elit yang berkuasa. Penelitian ini menggunakan teori Elit Lokal Pareto yang menjelaskan lapisan dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa relasi patron-klien dalam kemenangan Prabowo-Sandi di Kota Makassar dipengaruhi oleh tiga faktor dominan, yaitu jaringan dan kapabilitas dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan, investasi ekonomi, dan jabatan struktural dalam birokrasi. Kemenangan Prabowo-Sandi menggunakan kekuatan relasi patron-klien yang terbentuk dari tiga kelompok besar, dengan memanfaatkan faktor terbentuknya patron-klien, faktor kultural berupa budaya Ajoareng dan Joa' yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Kota Makassar secara historis, faktor ekonomi yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat, dan faktor organisasi Islam yang menguatkan relasi patron-klien dengan ideologi ketuhanan.</p>
Kata kunci: <i>Media Pembelajaran;</i> <i>Diorama;</i> <i>Audiovisual;</i> <i>Gotong Royong;</i> <i>Profil Pelajar Pancasila.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah bentuk dari kedaulatan rakyat sebagai negara dengan

sistem pemerintahandemokrasi tentu setiap warga dalam negaraaadalah aktor politik dengan peran yang sama dalam menentukan pemimpin

dan arah negara selanjutnya. Demokrasi hadir untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga untuk menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang mementingkan keuntungan pribadi. Sebagai warga negara dengan system pemerintahan demokrasi tentu bebas untuk memilih calon pemimpin yang mereka inginkan.

Dengan begitu pemilu tentu dapat menentukan nasib sebagian besar dari warga negara, pemilu kini menjadi parameter dalam mengukur sistem demokrasi satu ke satuan negara. Dalam sistem kenegaraan demokrasi sudah menjadi hal yang telah disepakati bahwa pemegang keputusan tertinggi adalah hasil dari kolektif yang dimana telah dipilih dari sekian banyak warga dalam negara. Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk menduduki jabatan publik melalui sebuah kompetisi untuk memperoleh dukungan rakyat menurut Schumpeter (Meidawati & Harimawan, 2004). Tentu akan menjadi kompetisi bagi kaum elit untuk memperoleh kekuasaan melalui cara yang damai tentu telah disepakati dalam konstitusi.

Indonesia telah mengalami revolusi dalam proses pemilihan umum sejak tahun 2004, pemimpin negara yaitu Presiden serta Wakil Presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lagi melainkan rakyat yang langsung memilih melalui kebijakan KPU. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan supremasi dari demokrasi dimana seluruh rakyat memiliki hak dalam menentukan pilihan itu sama rata. Bentuk legitimasi dalam mendapatkan kursi pimpinan ditentukan dari mayoritas memilih, artinya yang dipilih lebih banyak dari paslon lain yang akan menjadi pemimpin. 50%+1 adalah syarat sah untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dikatakan sebagai pemenang, ditambah 20% dari daerah pemenang. Pemilihan tahap kedua (Second round) akan dilakukan jika target diatas tidak tercapai (Marijan, 2008).

Tahun 2019 adalah kali keempat Indonesia melaksanakan pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang berbunyi pada nomor 42 tahun 2008 yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau pun gabungan dari partai politik, 20% adalah ambang minimal dari perolehan kursi untuk memenuhi prasyarat sebagai peserta dalam pemilu atau mendapatkan 25% suara nasional untuk mendapatkan kursi di DPR. Pengimplementasi dari Undang-undang tersebut adalah proses pemilihan umum pada

tahun 2019 ternyata hanya diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah paslon nomor 2 (dua) dan Jokowi-Amin sebagai paslon dengan nomor urut 1 (satu). Untuk paslon nomor urut 1 (satu) Jokowi-Amin mengendarai beberapa partai yang lebih dominan antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB) dan NasDem. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 (dua) Prabowo-Sandi diusung dari partai, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pemilihan umum dilakukan secara serentak termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai bentuk perwujudan demokrasi lokal dan akan menjadi salah satu ukuran tingkat partisipasi politik masyarakat di daerah, pemilihan kepala daerah akan menjadi momentum dan menentukan proses berjalannya demokrasi di dalam daerah tersebut, pemilihan kepala daerah tentu akan menjadi instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah kepala daerah.

Penulis memilih judul penelitian "Analisis relasi patron dan klien dalam proses pemenangan Prabowo-Sandi di Kota Makassar pada tahun 2019" melihat beberapa faktor yang masih digunakan dalam pola demokrasi di beberapa daerah di Indonesia Khususnya Sulawesi Selatan, Patronase yang terjadi di Nusantara juga telah menjadi sebuah ciri khas dari kebudayaan yang masih sangat dijaga. Di mana kebudayaan ini melibatkan emosional dan tentu akan berkelanjutan. Patronase yang dimaksud ialah ikatan yang terjalin dari dua orang atau lebih dengan mengikutsertakan ikatan persahabatan instrumental, dari seseorang yang memiliki derajat lebih tinggi sosial ekonominya akan disebut sebagai patron. Dengan menggunakan pengaruh serta sumberdaya ekonomi dan sosialnya dalam memberikan perlindungan atau mendapat keuntungan dari seseorang yang memiliki derajat lebih rendah atau disebut klien.

Secara garis besar kultur patron dan klien dapat dilihat pada pola kehidupan di desa, yang pada umumnya masyarakat pedesaan sering membentuk hubungan relasi timbal balik seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya. Hubungan Patron dan Klien juga masih jelas dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan dengan rata-rata mata pencaharian utamanya yaitu nelayan (Widianingsih, 2017).

II. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan proses penelitian seperti; lokasi penelitian serta waktu penelitian, metode dasar dan juga tipe yang digunakan peneliti, jenis data, serta teknik pengumpulan data, unit analisis dan teknik analisis data. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor mengartikan mengenai metodologi kualitatif sebagai suatu prosedur dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, baik itu berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Challis & Gretton, 2008). Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diperoleh gambaran bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan proses wawancara yang terbuka sebagai landasarn untuk dapat menelaah dan memahami pandangan, sikap, perasaan, dan juga pola perilaku individu ataupun sekelompok orang.

Tipe diskriptif merupakan suatu metode yang akan berfungsi dalam mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang menjadi bahan dalam penelitian, penelitian deskriptif analisis berusaha untuk mengambil masalah atau memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana penelitian dilaksanakan, hasil dari semua penelitian kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analisis berusaha untuk mengambil masalah atau memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana penelitian dilaksanakan, setelah itu hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dengan begitu penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara faktual mengenai "Analisis Relasi Patron dan Klien Dalam Proses Kemenangan Prabowo-Sandi Pada Pilpres 2019 di Kota Makassar". Dasar penelitian ini adalah studi kualitatif yaitu kepada lembaga dan individu. Lembaga yang dituju adalah partai pengusung dari Prabowo-Sandi serta tim pemenangan, selain itu ada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan lembaga survei politik, Sedangkan untuk individu

yang dimaksud penulis yaitu kaum akademisi yang fokus pada perpolitikan di Kota Makassar, efisiensi dan efektifitas adalah aspek yang sangat penting dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus akan mencoba untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi selama proses penelitian agar lebih mudah dipahami dan juga relevan dalam menjawab dan menjelaskan hasil dari penelitian.

Dari penjelasan di latar belakan, maka peneliti akan melaksanakan proses penelitian di Kota Makassar, adapun waktunya yaitu pada tahun 2020. Pilpres baru saja dilaksanakan pada April 2019 tentu peneliti akan mencari penemuan baru melihat dari rentan waktu yang belum begitu jauh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Patron Klien dalam menentukan pilihan politik masyarakat di Kota Makassar

Secara aspek historis, Kerajaan Gowa, Tallo, Wajo dan juga kerajaan-kerajaan kecil merupakan kerajaan di daerah Sulawesi Selatan, system pemerintahan pada masa itu tentu akan mempengaruhi system pada masa berikutnya. Namun pada masa penjajahan Belanda, Raja di masing-masing daerah diangkat sebagai kepala daerah (*regent*) dan penyelenggara pemerintahan. Birokrasi pemerintah pada waktu itu diwarnai dengan kelompok teknokrat yang bergelar, andi, karaeng, ataupun daeng. Raja diangkat menjadi kepala daerah dan kaum bangsawan lainnya dijadikan orang-orang yang memegang kursi birokrasi itu semua disebabkan karena budaya di Sulawesi Selatan telah terbiasa dengan bentuk seperti itu kemudian Belanda memperbaiki dan memberikan warna dan istilah baru bagi masyarakat di Sulawesi Selatan dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan.

Dengan begitu elit kultural telah menjadi elit struktural disebagian intitusi pemerintahan pada masa ini, kemudian kaum bangsawan yang menyadari bahwa status kebangsawanan mereka secara kultural perlahan memudar jika tidak diimbangi dengan relasi sosial dan pendidikan, prestasi sosial yang diakui oleh masyarakat akan menjadi sarana untuk mempertahankan posisi elit dan meningkatkan sertifikasi sosial yang diberikan masyarakat. Fenomena patro klien di Sulawesi Selatan atau politik kekerabatan selain dipengaruhi dari warisan elit struktural

juga diwarisi dari sosialisasi politik dalam keluarga (Lampe, 2015). Setelah peneliti melakukan penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pola patron klien di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar ditemukan faktor yang menjadi alasan kuatnya hubungan relasi patron klien dalam menentukan pilihan politik masyarakat Kota Makassar antara lain; Faktor Kultur, Faktor Ekonomi dan Faktor Organisasi Islam.

a) Faktor Kultural

Budaya politik merupakan hal yang dinilai berdampak pada pelaksanaan suatu sistem politik. Selain dari pada budaya politik dianggap sebagai nilai-nilai yang lahir dari ide, pengetahuan, adat istiadat atau mitos yang sebagian besar masyarakat masih memegang teguh keyakinan tersebut, juga dapat menjadi titik awal dalam menganalisis kehidupan politik suatu kelompok, negara atau bangsa, yang kemudian memberi kontribusi dalam mengembangkan sistem demokrasi (Surbakti et al., 2008). Perlu diketahui juga bahwa pemahaman tentang budaya politik adalah konsep yang akan menghubungkan nilai-nilai, sikap dan kepercayaan yang dianut masyarakat dengan relasi kekuasaan, hubungan elemen ini tentu akan dilihat pada realisasi suatu sistem politik atau kebijakan pemerintahannya. Budaya politik secara luas dapat dipahami sebagai sistem kepercayaan yang dimiliki bersama (a shared system of beliefs) terhadap suatu pemerintahan dan peran warga negara dalam menjalankan sistem pemerintahan tersebut.

Menurut Pelras, sebagai peneliti dari barat yang menjadi orang pertama meneliti relasi patron klien di Sulawesi Selatan mengatakan bahwa kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan sangat mencolok akan bentuk relasi patron kliennya, dari kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai nelayan atau sebagai petani, Pelras menemukan gejala-gejala tersebut saat ikut dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, Pelras kemudian memberikan pendapatnya bahwa hubungan patron klien yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan pola atau ciri khas dari masyarakat Bugis Makassar. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu

Febriyanto Syam menjelaskan sebagai berikut;

“Patron klien atau sering disebut Ajjoareng dan Joa’ adalah budaya kita Bugis Makassar yang sudah sejak lama kita rawat, bahkan ini telah menjadi budaya dalam pola kehidupan masyarakat kita, jika dilihat dari sudut pandang untung rugi maka kita akan melihat bahwa kerugian terbesar dialami oleh Joa’ namun itu sama sekali tidak menghilangkan rasa abadinya kepada Ajjoareng, itu dikarenakan rasa Siri’ yang menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan. Perlu kita tahu juga dek bahwa Siri’ itu tidak hanya dipegang oleh Joa’ tetapi Ajjoareng lah yang memiliki Siri’ lebih besar sehingga rasa tanggung-jawab kepada Joa’nya sangatlah dijaga, tentu dengan tujuan menjaga dan juga memperluas jaringan Joa’nya”.

Relasi patron klien dari kalangan masyarakat Bugis dapat dilihat dari konsep Ajjoareng dan Joa’. Menurut masyarakat Bugis Ajjoareng adalah panutan bagi masyarakat, posisi ini sering kali di tempati oleh para bangsawan seperti Punggawa, Aru atau pemuka masyarakat lainnya. Tokoh tersebut akan menjadi pemimpin dan menjadi pusat dari segala bentuk kegiatan masyarakat sekitarnya. Pengikut dari pada Ajjoareng ialah Joa’ mereka berasal dari kelompok masyarakat yang dimerdekakan oleh patronnya, oleh karena itu seseorang yang disebut sebagai Joa’ akan berusaha menunjukkan rasa kesetiiaannya kepada Ajjoareng karena dilain sisi masyarakat bugis akan selalu memegang teguh rasa malunya atau disebut sebagai Siri’.

b) Faktor Ekonomi

Kota Makassar merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek ekonomi juga tercermin dalam bentuk relasi pelayanan, balas jasa atau remunerasi, artinya ada hubungan timbal balik antara tuan tanah (patron) dengan masyarakat (klien) yang menempati tanah tersebut. Pemilik tanah akan menyediakan tempat atau ruang bagi klien, yang kemudian dikelola oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Kemudian secara tidak langsung hubungan ini terikat.

Masyarakat yang merupakan pengelola lahan yang tersebut berhutang kepada Karaeng, Karaeng yang dimaksud di sini adalah gelar dari tuan tanah pemilik setempat (Mattulada, 2014). Pertukaran jasa ini kemudian menjadikan masyarakat merasa terbantu oleh adanya hubungan ini, kemudian imbalan yang didapatkan oleh tuan tanah dari hubungan ini yakni masyarakat secara tidak langsung akan melakukan pengabdian kepada tuan tanah, seperti yang di katakan oleh salah satu narasumber peneliti yang bekerja di perusahaan Hadji Kalla; Muh. RA mengatakan;

“Patron atau kita sebut sebagai Karaeng pastimi baik sekali sama anak buahnya atau orang yang kerja dengan dia, sederhananya Karaeng yang punya tanah atau tempat nah orang-orang yang kerja ditempatnya itu pasti sangat bersyukur karena diberikan izin untuk mendirikan usaha diatas tanahnya atau tempatnya. Karena Kota Makassar sebagian besar ruko atau bangunan kantor yang banyak tentu yang sering kita lihat yaitu pegawai kantoran, yang juga menggantungkan kehidupannya dari si bos perusahaan”.

Menurut wawancara diatas tersebut, bahwa dari hubungan balas jasa ini kemudian menjadikan karaeng yang selaku tuan tanah (patron) sebagai orang yang paling dihargai di Kota Makassar, walaupun di Kota Makassar masih ada tanah yang bukan merupakan milik dari karaeng (patron) tapi ini secara tidak langsung menjadikannya sebagai penguasa atau elit dalam lokal tersebut yang sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Harold Lasswell yaitu Elit penguasa adalah golongan yang terdiri dari orang-orang yang berhasil meraih posisi dominan, sehingga elit dianggap sebagai individu yang menduduki jabatan tertinggi di berbagai lembaga. Menurutnya, individu-individu yang tergabung dalam kelompok elit relatif sangat terintegrasi, homogen dan erat satu sama lain. Selama ini tuan tanah (patron) memang mendominasi Kota Makassar, melalui hubungan balas jasa ini pengaruhnya bisa meluas ke bidang lain, seperti politik dan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari risiko yang jelas ada di masyarakat, yaitu dari hubungan timbal

balik ini dari karaeng (patron) dan Joa' (klien).

Dari model hubungan ekonomi patron kepada masyarakat Makassar sendiri berjalan dengan baik, masyarakat akan diberi tempat untuk bermukim dan juga dapat mengelola tanah tersebut seperti membuka usaha atau mengelolah lahan tersebut sebagai bercocok tanam sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. Dilihat dari segi ekonomi, Karaeng (patron) sepertinya tidak terlalu mengganggu hasil panen masyarakat. Karaeng memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengelola lahan untuk menghasilkan hasil pertanian, tetapi biasanya masyarakat sendiri mengetahui bahwa Karaeng (patron) harus diberikan hasil dari tanah yang dia miliki baik berupa hasil bumi atau berbentuk materi atau uang.

c) Faktor Organisasi Islam

Ormas Islam telah menunjukkan eksistensi dan pengaruhnya dalam proses kemerdekaan Indonesia, dan telah berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia dan dari berbagai bidang kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah: Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Salah satu alasan berdirinya organisasi Islam di Indonesia adalah untuk menjawab keinginan umat Islam untuk lepas dari penjajahan yang gerakannya beragam, baik model religius, sosial maupun politik. Dalam hal ini, Weber menekankan pentingnya agama dalam aksi sosial (Duile, 2017).

Gerakan politik di kalangan umat Islam selalu mengadopsi prinsip-prinsip gerakan dalam Al quran dan Sunnah Nabi karena mereka percaya bahwa Islam adalah sumber identitas dan motivasi jati diri mereka. Jika suatu kekuatan politik tertentu memasukkan atau memuat ketentuan bentuk hukum Islam dalam merumuskan asas dan tujuannya, maka kekuatan politik tersebut disebut politik Islam (Supriadin, 2014). FPI (Front Pembela Islam) disebut sebagai gerakan politik karena gerakan politik merupakan respon terhadap sistem politik yang dinilai tidak adil kepada rakyat hingga mereka melakukan gerakan yang dirancang untuk menunjukkan eksistensi dan ekspresi kepentingannya. FPI juga sama dalam peristiwa tertentu yaitu Gerakan Aksi Bela

Islam 411 dan 212 yang terjadi pada tahun 2016.

FPI mampu memobilisasi dan bergabung dengan banyak ormas Islam dari seluruh umat Islam di Indonesia untuk membentuk gerakan sosial berskala besar yang bertujuan untuk menekan pemerintah agar menangkap dan memenjarakan Ahok (dalam hal ini sebagai penista agama). Keberhasilan operasi ini dapat menyentuh dan mengubah kebijakan pemerintah yang memutuskan dan menetapkan Ahok sebagai tersangka penodaan agama terkait Surah Al-Maidah yang ia ungkapkan saat berkampanye. Menurut Andi Paowai sebagai narasumber yang juga Mahasiswa UIN Makassar sekaligus anggota aktif dalam Organisasi Islam di Kota Makassar mengatakan;

“Sama seperti apa yang sodara sebutkan tadi bahwa Organisasi dalam hal ini Organisasi Islam khususnya memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan pilihan politik masyarakat kita di Kota Makassar, walaupun Makassar ini dikenal sebagai Kota dengan berbagai macam etnik namun mayoritas masyarakatnya Islam dan juga sangat fundamental. Pengaruh besar kemenangan atau sangat menguntungkan paslon 02 pada pilpres 2019 yang lalu dikarenakan isu agama yang pernah terjadi di Indonesia yaitu 212 contohnya juga memiliki kekuatan yang besar di Kota Makassar, itulah yang menjadi kekuatan organisasi dalam mengubah atau menentukan pilihan politik masyarakat di Kota Makassar”.

Kekuatan organisasi keagamaan masih sangat mendominasi di Kota Makassar dan menjadi salah satu faktor penggerak basis massa dalam kebijakan politik. Gerakan yang dilakukan oleh organisasi islam di Kota Makassar seringkali dilaksanakan sesuai dengan isu kontemporer yang saat ini sedang berkembang ditengah masyarakat sehingga eksistensi dari sebuah organisasi masih menjadi perhatian di masyarakat, itulah mengapa organisasi keagamaan menjadi salah satu pengaruh besar dalam pilihan politik masyarakat di Kota Makassar khususnya.

2. Prilaku pemilih masyarakat Kota Makassar

Mengenai perilaku pemilih milenial pada pilpres tahun 2019 di Kota Makassar. Kota Makassar merupakan salah satu dari pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94). kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Dalam proses pemilihan Prwsiden dan Wakil Presiden, para pemilih milenial dalam menentukan pilihannya masih ada pemilih milenial menggunakan hak pilihnya masih bergantung pada orang lain yang disebabkan oleh ketidak pahaman pemilih milenial terkait politik dan pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan teori dari Gaffar dalam Yustiningrum bahwa Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah politik lingkungan sosial dimana dia berada, serta dari berbagai ikatan sosial yang ada dimasyarakat. Selain itu David Apter dalam Indar Melani menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orang tuanya. Bahwa, “adanaya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada lembaga keluarga itulah seseorang pertama kalai mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial mereka, termasuk peran politiknya.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 khususnya di Kota Makassar Pemilih milenial dalam hal ini dapat memilih secara rasional dalam menggunakan hak pilih yang diberikan dengan beberapa pertimbangan dengan melihat program-program yang dijanjikan bahkan melihat dari pengalaman-pengalaman dalam berpolitik yang dilakukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teori Downs bahwa teori rasional pada dasarnya menekankan pada motivasi

individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perilaku politik pemilih milenial dalam pelaksanaan pemilu 2019 di kota Makassar dengan indikator perilaku menurut Gaffar yaitu, Pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan juga pendekatan rasional yang dapat disimpulkan bahwa, Pemilih milenial yang secara nasional di seluruh Indonesia baik tingkat nasional, daerah/ kabupaten kota dan desa, jumlahnya mencapai 30% dari daftar pemilih tetap termasuk di Makassar, perilaku dari para pemilih milenial ini yang hidup berbarengan dengan teknologi lebih dominan pada pendekatan pilihan rasional yang melihat program kerja yang ditawarkan dan kinerja pada pemerintahan sebelumnya, serta kepopuleran calon di media sosial yang dijadikan para pemilih milenial sebagai referensi dalam menentukan pilihannya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan sosiologis atau pengaruh dari orang tua serta pilihan psikologis atau pilihan berdasarkan pada kedekatatan atau kepopuleran dengan calon kepala daerah juga tidak dapat dihilangkan, yang juga merupakan salah satu faktor atau pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam proses pemilihan umum

3. Relasi Patron Klien dalam mendukung kemenangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 di Kota Makassar

Keberhasilan dari tim pemenangan Prabowo-Sandi dalam menggungguli Jokowi-Amin di Kota Makassar pada pilpres tahun 2019 dimulai dari bergabungnya elit politik lokal yang berasal dari kalangan bangsawan masuk kedalam koalisi serta mempunyai tim memasuki ruang-ruang dalam masyarakat dari beberapa aspek serta lapisan struktur kehidupan masyarakat di Kota Makassar khususnya. Keberhasilan dari peran elit lokal (patron) yang menghegemoni sebagian besar masyarakat di Kota Makassar melalui peran dari beberapa organisasi atau komunitas yang

mampu untuk melakukan kontrol sosial dengan cara menempatkan diri sebagai "penolong" bagi masyarakat di wilayahnya atau dengan kata lain mereka menciptakan relasi patron klien sehingga legitimasi dan dukungan dari masyarakat dalam proses politik bukan hal yang mustahil mereka dapatkan.

Beberapa bentuk relasi yang memiliki pengaruh besar dan diteliti oleh penulis sebagai bagian dari entitas patron klien tersebut seperti halnya Komunitas Kaum Millenial yang membentuk relasi patron klien dengan pertukaran ekonomi dan politik, Emak emak Makassar membentuk relasi patron klien dari beberapa faktor antara lain latarbelakang patron serta kekuatan sosial yang diimbangi dengan kekuatan elit ekonomi, faktor yang terakhir penulis temukan yaitu kekuatan kuat ormas yang berada di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar yakni FPI (Front Pembela Islam) yang kita ketahui dari segi lingkup nasional dan daerah berposisi sebagai oposisi dari pihak pemerintahan Jokowi. Selain itu, beberapa organisasi dan komunitas kecil lainnya yang memiliki kekuatan politik yang cukup berpengaruh dalam memenangkan Prabowo Sandi. Berikut penjelasan lanjut penulis mengenai pengaruh beberapa organisasi tersebut dalam proses kemenangan Prabowo-Sandi berdasarkan faktor jaringan patron klien yang terjadi di Kota Makassar.

a) Komunitas Kaum Milenial

Berdasarkan temuan penulis ditemukan bahwa ada hubungan relasi dari masing-masing aktor yang saling terkait dimulai dari Muh. Ag yang merupakan orang kepercayaan dan banyak dibantu oleh AI sehingga Muh. Ag memiliki rasa balas budi terhadap AI yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan tahun 2017-2019 sekaligus atasan dalam perusahaan otomotif AI yaitu UD Cipta Jasa Motor di Kota Makassar untuk membantu keinginan AI memenangkan kader partai Gerindra dalam agenda pemilu dan puncak dari itu semua tentu untuk memenangkan Prabowo-Sandi pada pilpres tahun 2019 di Sulawesi Selatan. Kemudian Muh. Ibn yang merupakan teman atau junior dari Muh. Ag telah saling mengetahui satu sama lain dari masing-masing kepentingan yang mereka ingin capai, Muh. Ibn diterima menjadi staf ahli di DPRD Kota Makassar melalui fraksi Partai Gerindra dibawah asuhan Eric Horas

Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kota Makassar dan anggota dalam Komisi B Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Kota Makassar.

Hasil wawancara diatas selaras dengan yang diungkapkan Scott tentang alur yang digunakan patron-klien, terjadi ikatan timbal balik antara AI dan juga para pegawai dalam perusahaan yang dimilikinya, poin nomor satu dalam penjabaran Scott yaitu memberikan pekerjaan dengan jangka waktu yang lebih lama atau bahkan pekerjaan tetap dalam perusahaan yang dimiliki patron. Selanjutnya poin nomor empat yang menguatkan bahwa patron berhak untuk menerima imbalan dari kliennya atas apa yang telah dilakukan patron ke kliennya, patron juga berhak untuk mendapatkan hadiah dari kliennya atas perlindungan yang diberikan selama proses perkantoran dan juga dalam wilayah kekuasaan patron.

b) Emak Emak Kota Makassar

Istilah emak-emak sudah tidak asing lagi di Indonesia. Jauh sebelum hebohnya pilpres 2019, peran emak-emak sudah sering muncul di media sosial. Awalnya, istilah "the power of emak-emak" sering digunakan untuk menggambarkan emak-emak (perempuan) yang sering kali melakukan tindakan yang seenaknya sehingga membuat masyarakat lain menjadi kesal (Amalia, 2019). Istilah "the power of emak-emak" sering digunakan untuk mengomentari perilaku perempuan yang ceroboh saat mengendarai kendaraan bermotor. Contoh yang sering dikutip adalah ketika perempuan mengendarai sepeda motor matik, ibu-ibu ini menyalakan lampu sein ke kiri meskipun mereka memutar sepeda motor ke kanan. Fenomena ini kemudian ramai diperbincangkan di dunia maya. Dari kejadian tersebut, istilah "the power of emak-emak" seolah memberi kesan bahwa apa yang dilakukan perempuan akan berdampak pada masyarakat.

Selain kesan yang ditimbulkan emak-emak diatas, Istilah "the power of emak-emak" menjadi populer di media sosial. Oleh karena itu, istilah emak-emak menjadi lebih mudah dicerna bahkan dari sudut pandang politik, karena sebagian orang sudah mengenal istilah tersebut (Asri, 2019). Diranah politik, khususnya selama

Pilpres 2019 ini istilah the power of emak-emak melekat dengan salah satu calon wakil presiden yaitu Sandiaga Uno. Sandiaga Uno menyebut istilah ini dengan gamblang dalam pidatonya ketika melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hubungan relasi patron klien yang terbentuk dari AM menuju SMT adalah awal mula terbentuknya relasi patron klien yang masing-masing saling menguntungkan, kemudian SMT melanjutkan pola tersebut dengan memanfaatkan dirinya sebagai elit ekonomi dibawah patronnya yaitu AM, Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Makassar menjadi wadah dalam membentuk relasi patron klien yang dilakukan SMT, merekrut orang-orang yang dianggapnya memiliki pengaruh ditempat tinggalnya adalah salah satu strategi dalam memenuhi permintaan patronnya yaitu AM dalam memenangkan Prabowo-Sandi pada pilpres 2019.

Relasi yang dibentuk oleh SMT dalam HWK Kota Makassar yaitu memilih beberapa anggota yang menjadi juru kunci atau tim pemenangan Prabowo-Sandi dengan merekrut emak-emak di daerah masing-masing. NUR menjadi klien dari SMT yang berada di Kecamatan Tamalanrea, NUR tergabung dalam emak-emak yang dibentuk oleh SMT kemudian menjadi ketua, NUR berhasil merekrut emak-emak yang jumlahnya lebih dari 67 orang yang masing-masing cukup aktif dalam bersosialisasi, NUR memanfaatkan perkumpulan ibu-ibu PKK yang kemudian berubah menjadi emak-emak yang bersifat politis dan melek dalam memperjuangkan hak perempuan. SMT memberikan modal berupa toko campuran kepada NUR berkat usahanya dalam memenangkan Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 yang lalu. Penulis mengetehai bahwa pola yang dilakukan SMT kepada klien-kliennya adalah relasi patron klien yang saling memiliki ketergantungan atau saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, walaupun porsi SMT lebih menguntungkan dibandingkan dengan klien yang berada di empat kecamatan di Kota Makassar. SMT berhasil membangun citra AM sebagai patron sehingga klien-kliennya merasa memiliki hutang sosial yang akan dibayar dengan bentuk apapun.

c) Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar

Front Pembela Islam Sulawesi Selatan (FPI) telah berdiri selama 13 tahun dengan metode dakwah, dzikir, taklim dan tabligh sejak berdiri pada tahun 2007. Untuk FPI Makassar sendiri baru berdiri pada tahun 2010. Pada tahun awal berdirinya FPI Sulawesi Selatan diketuai oleh Habib Mahmud Alhamid sebagai DPD FPI Sulawesi Selatan dan dilanjutkan oleh Habib M. Reza Alhamid yang dideklarasikan di Mesjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar oleh ketua umum Habib M. Rizieq Shihab (Dewan Pimpinan Pusat), sedangkan untuk ketua DPD Sulawesi Selatan periode sekarang adalah Habib Muhsin Al-Habsyi. Ketua DPW Kota Makassar dipimpin oleh Ust. Agus Salim sejak di resmikannya DPW Kota Makassar hingga sekarang, dengan tujuan yang sama yaitu menegakkan "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar".

Meskipun Front Pembela Islam merupakan organisasi yang mendukung penerapan syariat Islam dalam hal ini, namun Front Pembela Islam juga menerima sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan hak pilihnya. Yang lebih penting lagi, organisasi ini belum pernah melakukan upaya untuk menggulingkan pemerintahan. Front Pembela Islam (FPI) muncul di masyarakat Indonesia dengan memberikan berbagai solusi dalam kondisi krisis sosial politik yang terjadi saat itu, terutama pada masa reformasi organisasi dan kelompok. FPI adalah Ormas Islam dengan gerakan sosial keagamaannya terlihat dari berbagai agenda dan kegiatannya yang secara aktif dilaksanakan, seperti pengajian, dakwah, dzikir, taklim dan tabligh. Arum salah satu partisipan FPI Kota Makassar dan alumni disalah satu pondok yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menegaskan adanya aktivitas tersebut;

"Front Pembela Islam Makassar sebagai organisasi Islam dengan gerakan keagamaannya yang pertama adalah pengajian, secara rutin melakukan pengajian setiap Jum'at malam di rumah teman-teman yang dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah setiap pekannya atau bahkan di sekretariat".

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Kiai, yaitu: Pertama, berasal dari keluarga Kiai di lingkungan

sekitarnya, sehingga dapat memanfaatkan kesetiaan sanak saudara dan masyarakat. Kedua, proses sosialisasi dan pendidikan seorang santri sehingga memiliki latar belakan kepemimpinan yang telah ditanam sejak dulu, Ketiga, adanya kesiapan pribadi yang tinggi untuk bertugas, atau kemauan untuk mengabdikan hidup pribadinya demi tugas pesantren. Keempat, sebagai tokoh agama dan masyarakat, menjadi relawan untuk bekerja membangun dan mendanai pesantren. Kelima, bisa menggalang dana dari warga pemilikinya dan menyumbangkan bantuan lainnya.

Gerakan Front Pembela Islam Makassar dalam mendukung kemenangan Prabowo-Sandi pada pilpres 2019, cukup memberikan pengaruh kepada masyarakat Kota Makassar. Pola patron klien yang ditemukan penulis dalam melihat kondisi organisasi ini tidak jauh berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya, Mosca mengatakan bahwa dalam semua masyarakat selalu muncul dua kelas, yaitu kelas yang berkuasa (Kiai) dan kelas yang dikuasai (Santri/Jama'ah). Kelas yang menguasai jumlahnya lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keistimewahan. Untuk memastikan kemenangan Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 yang lalu, AS menggerakkan alumni dari pesantren untuk secara berjama'ah melakukan kampanye serta melakukan sosialisasi kepada keluarga santri yang dilakukan di dalam pondok pesantren. A. Fajrul memberikan komentar kepada penulis dan membenarkan adanya gerakan tersebut;

"Sikap saya menanamkan amar ma'ruf. Jika sudah terjadi relasi atau hubungan kerjasama, apapun yang disampaikan dari hasil relasi atau hubungan kerjasama itu akan baik, berbeda lagi kalau bukan dengan relasi atau hubungan kerjasama baik pun dikatakan tidak baik. Jadi kalau kita sudah membentuk relasi atau hubungan kerjasama itu kita bisa memberikan amar ma'ruf nahi munkar, itu yang paling pokok".

Dari wawancara diatas A. Fajrul jelas mengatakan bahwa bentuk kerja sama antara pondok pesantren dan ormas FPI di Kota Makassar dilakukan di pesantren dengan cara sosialisasi dengan mendorong para alumni untuk ikut serta dalam

sosialisasi tersebut, alumni pondok pesantren juga mengirimkan/mendonorkan beberapa bantuan kepada pondok tercintanya sebagai rasa terimakasih dan juga rasa pengabdianya. A. Fajrul membenarkan bantuan tersebut;

"Bantuan yang berikan oleh alumnus saya kira sangat membantu menunjang, jelas seperti bantuan renovasi masjid akan memberikan efek nyaman bagi santri, ustad maupun jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid kami sedikit akan mempengaruhi kualitas iman, pembangunan poliklinik akan memberikan efek tenang bagi santri yang sakit agar tidak risau lagi ketika sedang mendapatkan musibah sakit".

Merekrut petinggi atau orang kepercayaan didalam pondok adalah strategi yang baik dalam untuk memberikan kekuatan yang lebih menjamin dalam memenangkan Prabowo-Sandi, A. Fajrul adalah kepala sekolah di dalam pondok pesantren yang juga alumni dari pondok tersebut. Sedangkan M. Arsyad dan Andi adalah pegawai di dalam pondok pesantren yang mereka juga termasuk alumni dari pondok pesantren, M. Arsyad sebagai pembina dari santri yang tugasnya menjadi pengganti orang tua dari para santri sedangkan Andi pegawai bagian administrasi di dalam pondok yang berinteraksi langsung kepada keluarga santri.

Bentuk relasi yang terjalin dalam kelompok ormas FPI di Kota Makassar ini khususnya bagi AS yang menjadi ketua FPI dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan paraalumni sebagai kliennya makan pola seperti ini akan terus berjalan dan akan bertahan lama. Ketakziman seorang santri dengan penuh keikhlasan dan kesadaran kepada kiainya maupun keluarganya dikarenakan kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral mereka terkait kedudukannya sebagai orang terdidik dan terpandang di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain para kiai menjadi patron bagi siapa saja, termasuk masyarakat disekitarnya bergantung padanya.

Dari pola patron klien yang terjadi pada kelompok ormas FPI di Kota Makassar selaras dengan pendapat Gaffar dan Syaikhon yang mengatakan patron

biasanya memiliki lebih banyak kemampuan seperti perlindungan, kasih sayang, kesejahteraan, keamanan sedangkan klien atau buruh biasanya hanya memiliki kesetiaan atau loyalitas serta tenaga untuk diberikan kepada patron. Bila hubungan ini berakhir maka keduanya akan mencari dan mungkin akan menjadi patron atau klien yang baru. Teori ini untuk melihat hubungan antara kiai (patron) dengan santri (klien).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kota Makassar mengenai fenomena patron klien dalam memenangkan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara historis pola patron klien telah lama dirasakan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar sebagai lokasi penelitian penulis, Ajoareng dan Joa' adalah konsep yang dikenal oleh masyarakat di Sulawesi Selatan yang kemudian disebut sebagai patron dan klien pada masa sekarang. Siri' atau rasa malu yang tidak hanya sekedar simbol nilai dalam masyarakat Sulawesi Selatan menjadi faktor pendukung dalam ikatan atau relasi patron klien yang selama ini telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penulis juga telah menjelaskan teori menurut Pareto yang mengatakan bahwa setiap kelompok masyarakat tentu memiliki lapisan-lapisan antara lain sebagai patron atau pemimpin dalam sekelompok masyarakat, orang tersebut memiliki kualitas dan sumber daya tertentu yang dibutuhkan masyarakat, bagi mereka yang dapat menjangkau segala lapisan dalam masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan kekuasaan politik dan ekonomi di daerah tersebut, merekalah yang dikenakal sebagai kaum elit atau patron.
2. Pola patron klien di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar peneliti menemukan faktor yang menjadi alasan kuatnya hubungan relasi patron klien dalam menentukan pilihan politik masyarakat Kota Makassar antara lain; (1) Faktor budaya adalah aspek politik dari sistem nilai, yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, dan mitos. Ide, pengetahuan,

adat istiadat dan mitos ini dipahami dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik sangat berharga dan akan berdampak pada implementasi sistem politik. Pemahaman budaya politik dapat digunakan sebagai titik tolak untuk menganalisis kehidupan suatu kelompok, suatu negara, atau sistem politik suatu negara, yang dapat membantu menganalisis dan mengembangkan kehidupan demokrasi. (2) Faktor ekonomi dan prospek ekonomi juga diwujudkan dalam bentuk hubungan balas jasa, hubungan balas jasa atau remunerasi, dan hubungan timbal balik antara tuan tanah (patron) dan masyarakat (klien) yang menempati tanah tersebut. Pemilik rumah menyediakan tempat atau tanah untuk klien, yang kemudian dikelola oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Pertukaran layanan semacam ini memungkinkan komunitas untuk mendapatkan bantuan dari hubungan ini, dan keuntungan yang didapat pemilik tanah ini adalah bahwa komunitas secara tidak langsung akan melayani tuan tanah. dan (3) Faktor organisasi telah menunjukkan eksistensi dan pengaruhnya dalam proses kemerdekaan Indonesia, dan turut serta dalam sistem politik Indonesia dan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Beberapa dari mereka adalah: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Alasan yang melatarbelakangi berdirinya organisasi Islam di Indonesia, salah satunya untuk merespon keinginan umat Islam untuk lepas dari penjajahan, corak pergerakannya juga beragam mulai yang bercorak keagamaan, sosial dan politik. Gerakan politik di kalangan umat Islam yang selalu mengambil prinsip-prinsip gerakannya pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena meyakini bahwa Islam merupakan sumber identitas dan sumber motivasi gerakannya.

3. Dari tiga faktor tersebut penulis menemukan komunitas atau kelompok yang telah memenuhi ketiga faktor tersebut sehingga relasi patron klien yang dibentuk masih bertahan sampai sekarang. Komunitas Kaum Millineal yang membentuk relasi patron klien dengan pertukaran ekonomi dan politik, Emak emak Makassar membentuk relasi patron klien dari beberapa

faktor antara lain latar belakang patron serta kekuatan sosial yang diimbangi dengan kekuatan elit ekonomi, faktor yang terakhir penulis temukan yaitu kekuatan kuat ormas yang berada di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar yakni FPI (Front Pembela Islam) yang kita ketahui dari segi lingkup nasional dan daerah berposisi sebagai oposisi dari pihak pemerintahan Jokowi. Selain itu, beberapa organisasi dan komunitas kecil lainnya yang memiliki kekuatan politik yang cukup berpengaruh dalam memenangkan Prabowo Sandi.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Komunikasi Politik dalam Proses Pemenangan Prabowo-Sandi di Kota Makassar pada Tahun 2019.

DAFTAR RUJUKAN

- Alam, A. Y. (2019). *Perbandingan Orientasi Politik Relawan Pada Pilpres 2019 Di Bandar Lampung*.
- Amalia, L. S. (2019). Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik "Emak-Emak Dan Ibu Bangsa" Pada Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 17-33.
- Amelia, A. R. (2020). Mobilisasi Dukungan Pada Pilkada Serentak 2018 Perbandingan Kemenangan Dan Kekalahan Kolom Kosong Di Kota Makassar Dan Kota Tangerang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2(2), 105-119.
- Asri, R. (2019). Pemaknaan The Power of Emak-Emak di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), 92-103.
- Challis, N., & Gretton, H. (2008). *Fundamental engineering mathematics: a student-friendly workbook*. Elsevier.
- Duile, T. (2017). Islam, politics, and cyber tribalism in Indonesia: a case study on the Front Pembela Islam. *International Quarterly for Asian Studies*, 48(3-4), 249-272.
- Fatmawati, N. I., & Sholikin, A. (2019). Literasi Digital, mendidik anak di era digital bagi

- orang tua milenial. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 119–138.
- Handika, R., & Azmi, A. (2020). Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial. *Journal of Civic Education*, 3(1), 61–73.
- Hiariej, E. (2010). Aksi dan identitas kolektif gerakan Islam radikal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2), 131–168.
- Lampe, M. (2015). Pinggawa-Sawi Nelayan Bugis-Makassar dalam Analisis Relasi Internal dan Eksternal. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(1), 77–88.
- Marijan, K. (2008). 5 The 1999 decentralization policy, local politics, and local capacity of the port city of Surabaya. *Port Cities in Asia and Europe*, 10, 86.
- Mattulada, A. (2014). Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi. *Antropologi Indonesia*.
- Meidawati, N., & Harimawan, M. (2004). Pengaruh Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2004 terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham LQ-45 di PT Bursa Efek Jakarta (BEJ). *Sinergi: Kajian Bisnis Dan Manajemen*, 7(1).
- Najamuddin, N. (2015). Persaingan Elit Bangsawan dengan Kelompok Terdidik pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 11(1).
- Priyatna, F. N., & Sumartono, S. (2011). Pola Pemanfaatan Sumber Daya, Subsistensi Dan Pola Hubungan Patron-Klien Masyarakat Nelayan Danau Tempe, Sulawesi Selatan. *Jurnal Matematika Sains Dan Teknologi*, 12(1), 37–45.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 4.
- Supriadin, S. (2014). Politik Pendidikan Islam Di Indonesia: Analisis Sistem Pendidikan Pesantren Dan Madrasah. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 18–41.
- Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Partnership for Governance Reform Indonesia.
- Weber, M. (1946). Politics as a Vocation: lecture to the free Students Society at Munich university, January 1919. *From Max Weber: Essays in Sociology*, 77–128.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Journal Signal*, 5(2).